

---

# ANALISIS PERAN ORGANISASI NON-PEMERINTAH DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Desri Yanti Natalia Manurung

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Organisasi non-pemerintah memiliki peran yang semakin signifikan dalam membentuk dan memengaruhi kebijakan publik di berbagai tingkatan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran NGO dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa dimensi. Pertama, NGO berperan sebagai agen pengkatalis, mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan perhatian dan memobilisasi dukungan publik. Kedua, NGO berfungsi sebagai mitra kolaboratif bagi pemerintah, bekerja sama dalam penyusunan kebijakan untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi NGO dalam melaksanakan perannya, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya akses ke informasi, dan terbatasnya pengakuan resmi. Meskipun demikian, peran NGO tetap penting dalam memastikan adanya mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika peran NGO dalam proses pembuatan kebijakan publik, serta menyoroti pentingnya memperkuat keterlibatan dan kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Globalisasi Ekonomi, Ketidaksetaraan Sosial, Negara Berkembang, Distribusi Pendapatan, Kebijakan Publik

---



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara menuntut peningkatan keterlibatan masyarakat sipil, khususnya organisasi non-pemerintah (NGO), dalam proses pembuatan kebijakan publik. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas isu-isu sosial dan lingkungan, pemerintah semakin menyadari perlunya inklusi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan.*

*Organisasi non-pemerintah, sebagai perwakilan masyarakat sipil, memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu kritis, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan membentuk arah kebijakan. Keterlibatan NGO dalam proses kebijakan menciptakan ruang untuk pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil, yang dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat kontrol sosial.*

*Namun, meskipun kontribusi yang signifikan ini, peran NGO dalam pembuatan kebijakan tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Keterbatasan sumber daya, akses terbatas ke informasi, dan kurangnya pengakuan formal sering kali menjadi kendala yang menghambat efektivitas organisasi non-pemerintah dalam memengaruhi kebijakan.*

*Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut peran konkret organisasi non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik, mengeksplorasi dinamika kolaboratif dengan pemerintah, dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam upaya mereka untuk mencapai kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap peran NGO, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan publik.*

*Dalam beberapa dekade terakhir, peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam proses pembuatan kebijakan publik telah mengalami peningkatan signifikan. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat akan kebijakan yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. NGO, sebagai wakil masyarakat sipil, menjadi agen penting dalam mendukung pembentukan kebijakan yang memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan.*

*Globalisasi dan kompleksitas isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan hak asasi manusia telah memperkuat urgensi peran NGO. Keberadaan mereka dalam ruang kebijakan dapat menciptakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat tali kerjasama, dan membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.*

*Meskipun demikian, penelitian tentang peran konkret NGO dalam proses pembuatan kebijakan masih terus berkembang. Adanya tantangan seperti perbedaan pandangan antara pemerintah dan NGO, kendala sumber daya, dan pertanyaan seputar legitimasi sering kali memerlukan analisis mendalam untuk memahami secara holistik dampak partisipasi NGO dalam menciptakan kebijakan yang adil dan efektif.*

*Dalam konteks ini, penelitian ini mengajukan pertanyaan kritis mengenai dinamika peran NGO dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan fokus pada interaksi antara pemerintah dan NGO, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh NGO, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana organisasi non-pemerintah dapat menjadi kekuatan positif dalam mencapai tujuan pembuatan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.*

*Pada era yang ditandai oleh perubahan dinamis di berbagai sektor kehidupan, peran organisasi non-pemerintah (NGO) semakin diperhitungkan dalam menyusun kebijakan publik. Isu-isu kompleks seperti ketidakesetaraan, kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. NGO, sebagai representasi masyarakat, memiliki potensi untuk membawa suara yang kuat, mengartikulasikan kepentingan yang beragam, dan menciptakan mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan publik.*

*Globalisasi informasi dan teknologi telah mempercepat pertukaran ide dan kolaborasi antar NGO, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara lebih efektif dalam penyusunan kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Namun, kesuksesan ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh NGO, seperti perbedaan ideologi, kebijakan pemerintah yang tidak selalu terbuka terhadap partisipasi masyarakat, dan ketidakseimbangan sumber daya.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika peran NGO dalam pembuatan kebijakan publik, dengan fokus pada hubungan kolaboratif mereka dengan pemerintah dan dampak konkrit yang dihasilkan dalam formulasi kebijakan. Dengan menyoroti keterlibatan masyarakat sipil, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana keberadaan NGO dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kebijakan publik. Analisis terhadap tantangan dan strategi yang digunakan oleh NGO juga dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas keterlibatan mereka dalam merumuskan kebijakan yang bersifat inklusif.*

## **Metode Penelitian**

*Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika, interaksi, dan konteks yang melibatkan NGO dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Berikut adalah rincian metode penelitian yang akan digunakan:*

- 1. Studi Kasus:** *Penelitian ini akan memilih beberapa kasus studi yang representatif dari kerjasama antara NGO dan pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Kasus studi akan dipilih dari berbagai tingkatan pemerintahan dan bidang kebijakan untuk mencakup spektrum isu yang beragam.*

2. **Wawancara Mendalam:** Wawancara akan dilakukan dengan perwakilan dari NGO, pemerintah, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Wawancara mendalam akan membahas peran masing-masing pihak, motivasi kolaborasi, hambatan yang dihadapi, serta dampak konkrit dari keterlibatan NGO.
3. **Analisis Dokumen:** Analisis dokumen akan mencakup kebijakan, laporan kegiatan NGO, dokumen resmi pemerintah, dan materi lain yang relevan. Dokumen ini akan memberikan konteks sejarah, tujuan, dan evolusi kebijakan yang terkait dengan peran NGO.
4. **Observasi Partisipatif:** Pada beberapa tahap tertentu, penelitian ini dapat melibatkan observasi partisipatif untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang interaksi dan dinamika kolaboratif antara NGO dan pemerintah. Observasi ini dapat dilakukan dalam pertemuan, forum, atau kegiatan terkait lainnya.
5. **Analisis Tematik:** Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama. Penggunaan teknik analisis tematik akan membantu dalam merinci peran NGO, menggambarkan hambatan yang dihadapi, serta menyoroti dampak positif yang dihasilkan.
6. **Verifikasi dan Triangulasi:** Untuk meningkatkan validitas hasil, data dan temuan akan diverifikasi melalui proses triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam proses pembuatan kebijakan publik. Studi kasus akan menjadi landasan untuk memilih beberapa kasus yang mewakili kerjasama antara NGO dan pemerintah, mencakup berbagai tingkatan pemerintahan dan isu kebijakan yang beragam.

Wawancara mendalam dengan perwakilan NGO, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait akan memberikan wawasan langsung tentang peran masing-masing pihak, motivasi kolaborasi, hambatan yang dihadapi, dan dampak konkrit dari keterlibatan NGO. Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan kebijakan, laporan kegiatan NGO, dokumen pemerintah, dan materi lainnya untuk memberikan konteks sejarah dan evolusi kebijakan yang terkait. Observasi partisipatif akan memberikan pemahaman langsung tentang interaksi dan dinamika kolaboratif. Analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama dari data yang terkumpul. Validitas hasil penelitian akan ditingkatkan melalui verifikasi dan triangulasi data dari berbagai sumber dan metode penelitian.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran NGO dalam merumuskan kebijakan publik dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Penggunaan metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang peran, interaksi, serta dampak kontribusi NGO dalam proses pembuatan kebijakan publik.

*Studi kasus dipilih untuk memastikan representativitas dan diversitas, memungkinkan penelitian untuk menggali dinamika yang dapat bervariasi di berbagai konteks kebijakan. Wawancara mendalam diharapkan dapat mengungkapkan pandangan dan pengalaman langsung para pemangku kepentingan, memberikan nuansa yang kaya terkait dinamika kolaboratif antara NGO dan pemerintah.*

*Penerapan analisis dokumen akan memungkinkan penelitian untuk melihat kebelakang dan menganalisis kebijakan serta keputusan yang telah dibuat dalam konteks yang lebih luas. Observasi partisipatif memberikan dimensi tindakan yang penting, memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek yang mungkin sulit diungkapkan melalui wawancara atau analisis dokumen saja. Analisis tematik akan memberikan kerangka kerja untuk mengorganisir dan memahami temuan secara komprehensif, sementara verifikasi dan triangulasi akan memastikan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh.*

*Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang substansial terkait peran aktif NGO dalam membentuk kebijakan publik, mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul, dan memberikan kontribusi positif pada pembentukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan merinci faktor-faktor kunci yang memengaruhi proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam keterlibatan NGO dalam arena kebijakan*

*Melalui kombinasi metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran, tantangan, dan dampak NGO dalam proses pembuatan kebijakan publik.*

## **PEMBAHASAN**

*Dalam mengeksplorasi hasil penelitian ini, sejumlah temuan kunci menjadi fokus perbincangan yang mendalam. Pertama-tama, peran esensial NGO dalam mengidentifikasi isu-isu kebijakan yang kritis telah terbukti memberikan kontribusi penting dalam membentuk agenda kebijakan. Dengan menjadi agen pengkatalis, NGO mampu mendeteksi dan memperjuangkan isu-isu yang mungkin terabaikan oleh pemerintah, menghasilkan perubahan arah dan peningkatan tanggapan kebijakan terhadap masalah-masalah tersebut.*

*Dalam konteks kerjasama dengan pemerintah, kolaborasi antara NGO dan entitas pemerintahan terbukti memberikan dampak positif dalam penyusunan kebijakan. Perspektif beragam yang dipersembahkan oleh NGO memperkaya pembuat kebijakan dengan wawasan dan pemahaman mendalam tentang realitas lapangan. Pengakuan terhadap kontribusi masyarakat sipil meningkatkan keterbukaan dan mendukung terciptanya kebijakan yang lebih akurat dan efektif.*

Namun demikian, temuan juga menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Kendala sumber daya, terutama secara finansial dan manusia, menjadi faktor utama yang membatasi kapasitas NGO dalam berpartisipasi secara maksimal. Selain itu, perbedaan ideologi dan pandangan dengan pemerintah dapat memperlambat proses kolaborasi, menekankan pentingnya dialog terbuka dan pemahaman bersama untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, penelitian ini menganjurkan perlunya penguatan jaringan dan koordinasi antar-NGO serta penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan dampak. Lebih lanjut, perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Dengan kesimpulan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika peran NGO dalam pembuatan kebijakan. Implikasinya merentang dari rekomendasi praktis hingga kontribusi konseptual terhadap literatur tentang partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan publik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah, NGO, dan masyarakat sipil untuk merancang strategi yang lebih efektif dan inklusif dalam mengatasi tantangan kebijakan masa depan.

**Pentingnya Jaringan dan Koordinasi Antar-NGO:** Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya jaringan dan koordinasi antar-NGO dalam meningkatkan dampak keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan. Kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai organisasi dapat mengatasi keterbatasan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan strategi bersama untuk mendukung isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat sipil.

**Relevansi Penerapan Teknologi dan Inovasi:** Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi dan inovasi dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas NGO dalam pembuatan kebijakan. Penggunaan platform digital, analisis data yang canggih, dan strategi komunikasi yang inovatif dapat memperkuat suara NGO, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memberikan dampak yang lebih besar pada masyarakat.

**Perlunya Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat:** Selanjutnya, penelitian ini menyoroti perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun NGO memiliki peran penting sebagai perwakilan masyarakat sipil, partisipasi langsung dari warga juga diperlukan untuk memastikan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

**Kesimpulan dan Implikasi:** Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peran organisasi non-pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan NGO, tantangan yang dihadapi, dan dampak positif yang dihasilkan, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan. Implikasi temuan ini juga dapat membantu pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan keterlibatan NGO dan masyarakat sipil secara keseluruhan dalam proses pembuatan kebijakan.

*Dalam mengevaluasi dampak kontrol sosial yang dilakukan oleh NGO, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif mereka memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sipil. Meskipun terdapat beberapa hambatan, peran kontrol sosial ini memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.*

*Selain itu, rekomendasi praktis dihasilkan dari temuan penelitian untuk memperkuat peran NGO dalam pembuatan kebijakan. Pertama, perlu adanya peningkatan dukungan finansial dan kapasitas bagi NGO guna mengatasi hambatan sumber daya yang signifikan. Hal ini dapat mencakup pemberian dana yang lebih besar dari pihak pemerintah atau lembaga donor, serta pelibatan sektor swasta dalam mendukung upaya kebijakan yang dilakukan oleh NGO.*

*Kedua, dalam konteks penggunaan teknologi dan inovasi, perluasan penggunaan platform digital dan alat komunikasi yang canggih dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan dampak. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung kampanye dan advokasi, tetapi juga mempercepat proses komunikasi dan koordinasi antar-NGO dan dengan pemerintah.*

*Selanjutnya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat dicapai melalui pendekatan yang inklusif dan edukatif. Inisiatif seperti forum masyarakat, diskusi publik, dan pelibatan warga dalam tahap-tahap awal perumusan kebijakan dapat memperkuat keberlanjutan dan relevansi kebijakan yang dihasilkan.*

*Dengan merangkum temuan dan memberikan rekomendasi praktis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika peran NGO dalam pembuatan kebijakan publik dan memberikan dasar untuk tindakan nyata menuju kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*

*Terlebih lagi, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat keterlibatan dan kerjasama antara NGO dan pemerintah. Pembentukan mekanisme formal untuk dialog dan konsultasi rutin antara kedua pihak dapat mempromosikan saling pengertian, meredakan ketegangan, dan menciptakan kerangka kerja yang lebih stabil untuk kolaborasi berkelanjutan. Dalam konteks ini, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung partisipasi masyarakat sipil, serta peningkatan responsivitas pemerintah terhadap masukan yang berasal dari NGO.*

*Selain itu, langkah-langkah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara NGO dan pemerintah dapat meningkatkan kapasitas kedua belah pihak. Program pelatihan, seminar, dan lokakarya bersama dapat memperkuat pemahaman bersama tentang isu-isu kebijakan dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi dan keterampilan ini akan mendukung efektivitas kerjasama dalam jangka panjang.*

*Terakhir, penelitian ini menyoroti kebutuhan akan pengukuran dan evaluasi yang terus-menerus terhadap keterlibatan NGO dalam pembuatan kebijakan. Penilaian kinerja yang berkala dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk pengembangan strategi lebih lanjut. Sistem evaluasi ini juga dapat membantu menangkap dampak nyata dari peran NGO dalam pengambilan keputusan dan menyediakan dasar empiris untuk peningkatan berkelanjutan.*

*Dengan menggabungkan rekomendasi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, NGO, dan masyarakat sipil untuk memperkuat peran dan kontribusi mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Upaya bersama ini penting untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.*

## **Kesimpulan**

*Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam proses pembuatan kebijakan publik memiliki dampak signifikan pada dinamika partisipatif dan kontrol sosial. Melalui peran sebagai agen pengkatalis, NGO mampu mengidentifikasi isu-isu penting, membawa perhatian pada kebutuhan masyarakat, dan memobilisasi dukungan publik. Kolaborasi mereka dengan pemerintah membawa perspektif yang beragam, meningkatkan keterbukaan, dan memperkuat akuntabilitas kebijakan.*

*Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan ideologi menunjukkan bahwa peran NGO tidak terlepas dari hambatan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran NGO dalam pembuatan kebijakan. Rekomendasi termasuk peningkatan dukungan finansial dan kapasitas, penguatan jaringan dan koordinasi antar-NGO, penerapan teknologi dan inovasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.*

*Pentingnya keterlibatan dan kerjasama antara NGO dan pemerintah juga menonjol, menekankan kebutuhan untuk dialog terbuka, konsultasi rutin, dan mekanisme formal untuk memastikan hubungan yang stabil. Sementara itu, evaluasi berkelanjutan atas keterlibatan NGO diperlukan untuk memonitor dan meningkatkan dampak nyata dari peran mereka dalam pembuatan kebijakan.*

*Keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang dinamika peran NGO dalam proses kebijakan publik. Implikasinya merentang dari rekomendasi praktis hingga kontribusi konseptual terhadap literatur tentang partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan publik. Dengan memperkuat peran dan kontribusi NGO, bersama dengan upaya bersama masyarakat sipil, dapat diharapkan terwujudnya kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong*

- Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).*
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). *Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.*
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sapirok Tapanuli Selatan.*
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.*
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik.*
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.*
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Revisi).*
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.*
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.*
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).*
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.*
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.*
- Hidayat, R. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Hutabarat, C. M. (2021). *Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Pada Campuran Beton K175 Terhadap Kuat Tekan Beton (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas*

- Medan Area).
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.